

Naskah AKHIR
16 Agustus 2012
Malam



**SKENARIO DAN PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2012-2013**

KAMIS, 16 AGUSTUS 2012

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2012**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**SKENARIO DAN PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2012-2013**

KAMIS, 16 AGUSTUS 2012
Pukul: 20.00 WIB

ACARA:

1. Pidato Ketua DPR-RI Pembukaan Masa Persidangan Sidang I Tahun Sidang 2012-2013.
2. Pidato Presiden RI dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2013 dan Nota Keuangannya beserta Dokumen Pendukung.

**KEDATANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI
DIDAMPINGI OLEH PIMPINAN DPR-RI**

PEMBAWA ACARA:

1. Presiden dan Wakil Presiden didampingi Pimpinan DPR dan DPD memasuki Ruang Paripurna Nusantara.
2. Hadirin dimohon berdiri.

MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA

PEMBAWA ACARA:

Menyanyikan Bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

PEMBAWA ACARA:
Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

PIDATO KETUA DPR-RI

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Yang kami hormati,

- **Saudara Presiden Republik Indonesia,**
- **Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia,**
- **Saudara Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPR-RI,**
- **Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPD-RI,**
- **Saudara Ketua dan Wakil Ketua Lembaga-lembaga Negara,**
- **Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II,**
- **Para Undangan dan hadirin yang kami muliakan,**

Mengawali Rapat Paripurna DPR-RI hari ini, perkenankanlah saya mengajak kita semua untuk mempersembahkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga malam hari ini kita dapat hadir pada Rapat Paripurna dalam rangka Pembukaan

Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013 dalam keadaan sehat.

Agenda Rapat Paripurna DPR-RI malam hari ini, yang juga dihadiri oleh seluruh Pimpinan dan Anggota DPD-RI, adalah [1] **Pidato Ketua DPR-RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013**, dan [2] **Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN 2013 dan Nota Keuangannya**.

Kehadiran seluruh Pimpinan dan Anggota DPD-RI dalam agenda Sidang Paripurna DPR-RI malam ini, mencerminkan spirit politik kenegaraan di dalam satu rangkaian kegiatan bersama, berkaitan dengan fungsi DPD-RI dalam memberikan pertimbangan atas Pembahasan RAPBN, sesuai UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 154.

Berdasarkan catatan dari Sekretariat Jenderal, telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak Anggota Dewan, terdiri dari seluruh unsur fraksi DPR-RI. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib, dengan mengucap ***Bismillahirrahmanirrahim***, izinkan kami membuka Rapat Paripurna DPR-RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013. Sesuai dengan

ketentuan Peraturan DPR tentang Tata Tertib, Rapat Paripurna ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1 X

**Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Hadirin Peserta Sidang Yang Terhormat,**

Tadi pagi, DPR-RI dan DPD-RI telah menyelenggarakan Sidang Bersama dengan agenda pokok, **Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-67 Proklamasi Kemerdekaan RI**. Kita semua, segenap bangsa Indonesia, wajib memaknai arti kemerdekaan Indonesia. Para pendiri bangsa telah bertekad untuk mendirikan suatu negara yang "merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Bertujuan untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut, segenap bangsa Indonesia memiliki komitmen dan tanggung jawab bersama, tidak hanya menata dan membangun demokrasi,

tetapi berusaha mewujudkan stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi, yang akan memperkuat pondasi perekonomian nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kita harus selalu mengobarkan semangat persatuan dan kesatuan, bersama-sama membangun, mengimplementasikan pembangunan di daerah dengan lebih bersinergi bagi kemajuan masyarakat.

Dalam kaitan inilah, dalam Rapat Paripurna ini Presiden akan menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2013.

**Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Hadirin Peserta Sidang Yang Terhormat,**

Sesuai dengan Tata Tertib DPR, izinkanlah kami menyampaikan kepada Sidang Dewan Yang Terhormat, beberapa surat masuk yang telah diterima oleh Pimpinan DPR. Surat-surat masuk tersebut adalah: 4 (empat) surat masuk dari Presiden RI tertanggal 16, 17 dan 27 Juli 2012 perihal penyampaian RUU tentang Usaha Perasuransian dan permohonan pertimbangan bagi pencalonan duta-duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara sahabat untuk Republik Indonesia; 5 (lima) surat dari Ketua DPD-RI yaitu No. HM.310/363 dan HM.310/364 tertanggal

5 Juli 2012, surat DPD RI No. HM.310/398, No. HM.310/399, dan No. HM.310/401 masing-masing tertanggal 30 Juli 2012, yang kesemuanya merupakan penyampaian Keputusan-keputusan DPD-RI; 3 (tiga) surat dari Ketua BPK-RI tertanggal 23, 24 dan 25 Juli 2012, perihal penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara; serta 1 (satu) surat dari Ketua KOMNAS HAM RI No. 142/TUA/VI/2012 tentang Penyampaian Hasil Akhir Seleksi Calon Anggota Komnas Ham Periode 2012 - 2017. Surat-surat tersebut akan diproses sesuai dengan prosedur dan mekanisme Tata Tertib DPR RI.

Pada kesempatan ini juga perlu saya informasikan kepada Sidang Dewan Yang Terhormat, bahwa pada Masa Reses yang lalu telah dilakukan pengambilan sumpah 2 (dua) anggota DPR Pengganti Antar Waktu, Drs. Sofyan Ali, mewakili Partai Demokrat Daerah Pemilihan Jambi menggantikan Saudara Drs. As'ad Syam, dan Saudara Ir. H. Marsanto MS, mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Timur IX, menggantikan Saudara Drs. Soewarno. Kepada kedua anggota yang telah diambil sumpah, kami ucapkan selamat bertugas.

Hadirin Peserta Sidang Yang Terhormat,

Masa Persidangan I akan berlangsung sejak 16 Agustus sampai dengan 25 Oktober 2012. Pada Masa Sidang ini, Dewan

akan melaksanakan 3 (tiga) fungsi utama Dewan, yaitu fungsi anggaran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan, serta tugas-tugas lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam fungsi anggaran, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RUU tentang APBN harus diselesaikan dua bulan sebelum tahun anggaran tersebut berjalan atau akhir bulan Oktober 2012, pada akhir Masa Sidang I.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. APBN merupakan instrumen kebijakan fiskal Pemerintah untuk mengarahkan perekonomian nasional. Melalui kebijakan yang tercermin dari komposisi belanjanya, APBN diharapkan mampu melakukan ekspansi yang dapat memacu kegiatan ekonomi yang lebih produktif dan mendorong pro-pertumbuhan, pro-lapangan kerja, pro-pengurangan kemiskinan, dan pro-lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia Indonesia. Secara konstitusional, fungsi anggaran DPR adalah sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagai

bangsa dan negara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mencapai tujuan bernegara dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Amanat konstitusi juga menegaskan perlunya percepatan pembangunan di seluruh daerah, untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat secara merata, melalui politik desentralisasi, termasuk desentralisasi fiskal, dengan prinsip pengakuan atas ciri dan keragaman daerah. APBN juga ditujukan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar rakyat yang tersebar di seluruh daerah. Dengan demikian, politik anggaran negara menuntut perumusan pengelolaan anggaran negara yang jelas dan terukur, menjaga kesinambungan pembangunan serta tetap mengutamakan kepentingan rakyat dan kedaulatan negara.

Proses penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2013 telah didahului melalui mekanisme Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2013, yang telah dibahas oleh DPR dan Pemerintah pada Masa Persidangan IV yang lalu. Dalam pembahasan Asumsi Makro Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013, DPR dan Pemerintah sepakat mengambil tema pokok: "MEMPERKUAT

PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT”.

Atas dasar tema pokok tersebut, Dewan menekankan kepada Pemerintah agar memperluas partisipasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk memperluas partisipasi swasta dan BUMN bersama Pemerintah Pusat dan Daerah, bagi keberhasilan pembangunan nasional. Dalam pencapaian sasaran pembangunan sepanjang tahun 2013, ditekankan pada beberapa prioritas antara lain: Penanggulangan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Infrastruktur, Iklim Investasi dan Iklim Usaha, serta Energi. Dalam Pembicaraan Pendahuluan, Dewan telah menyepakati Asumsi Makro Ekonomi dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2013 sebagai pedoman dalam penyusunan APBN Tahun 2013, antara lain: *Pertumbuhan ekonomi 6,8 – 7,2 persen; Inflasi disepakati 4,4 – 5,4 persen; Nilai tukar Rupiah 9.000,00 - 9.300,00 per dollar Amerika Serikat; Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan 4,5 – 5,5 persen; Produksi minyak bumi (lifting) sebesar 890 – 930 ribu barel per hari; dan Harga Patokan Minyak Bumi Indonesia 95,0 - 120 dolar Amerika Serikat per barel.*

Dengan melihat prognosa dan program prioritas dalam RAPBN 2013, DPR dan Pemerintah segera akan melakukan

pembahasan program prioritas secara seksama dan terukur. Hal ini penting mengingat kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu, agar pelaksanaan APBN 2013 tidak jauh dari perencanaan. Pada perencanaan awal, Pemerintah menargetkan Pertumbuhan Ekonomi yang cukup optimis yakni antara 6,8 – 7,2 persen. Namun DPR mengingatkan, bahwa ada persyaratan penting untuk dapat mencapai angka pertumbuhan tersebut, berikut tingkat kualitas pertumbuhan yang akan dicapai dalam satu tahun ke depan. Pertumbuhan ekonomi disebut berkualitas apabila dapat menciptakan kesempatan kerja dan pengurangan tingkat kemiskinan, yang disertai dengan pemerataannya, sehingga kesenjangan ekonomi bisa ditekan guna mewujudkan keadilan ekonomi. Pertumbuhan yang tidak dibarengi dengan pemerataan akan menyebabkan kesenjangan yang semakin melebar dan berpotensi besar menimbulkan masalah di aspek yang lain, terutama aspek sosial dan politik.

Ada kekhawatiran bahwa perekonomian Indonesia akan menghadapi tantangan yang sangat berat di tahun 2013. Untuk menghadapi krisis finansial jangka pendek perlu peningkatan kesiagaan fiskal (*fiscal back-up*). Pada saat bersamaan, Pemerintah juga harus mempersiapkan berbagai kebijakan yang mendukung pertumbuhan jangka menengah dan jangka panjang, di tengah perekonomian dunia yang cenderung melemah. Dewan

meminta, Pemerintah tidak terbuai dengan hasil pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam 3 tahun terakhir. Pemerintah perlu memberikan bukti yang realistis dalam upaya penciptaan lapangan kerja baru, dan program jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah yang tepat sasaran. Perlu diingatkan bahwa semua negara dalam era globalisasi, cepat atau lambat akan terpengaruh dan tidak kebal terhadap krisis, termasuk Indonesia. DPR meminta Pemerintah untuk bekerja lebih keras dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkat kuatnya faktor konsumsi domestik dan investasi.

Kebijakan pengendalian BBM bersubsidi dan kebijakan pengembangan energi alternatif lain juga menjadi perhatian DPR dalam rangka pembahasan RAPBN. DPR terus mendorong Pemerintah untuk secara konsisten melaksanakan kebijakan penghematan konsumsi BBM bersubsidi yang cenderung terus meningkat. Dengan tingkat pertumbuhan konsumsi BBM sebesar 9%, konsumsi BBM akan dapat mencapai 48 juta kiloliter pada tahun 2013. Implikasi dari situasi seperti ini, tentunya akan semakin membebani subsidi APBN untuk BBM. Kenaikan fenomenal konsumsi BBM bersubsidi secara nasional misalnya, telah terlihat dalam rentang waktu semester pertama APBN 2012 yang sedang berjalan. BPH Migas Pertamina melansir bahwa

dalam semester pertama tahun ini, BBM bersubsidi seperti premium dan solar telah melebihi ambang batas kuota, yakni 21,7 juta kiloliter atau setara dengan 109,4% dari kuota yang ditetapkan. BPH Migas juga mencatat bahwa hampir semua provinsi mengalami *over-kuota*.

Terkait kebijakan pengembangan energi alternatif, DPR mengingatkan Pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah dalam melaksanakan kebijakan tersebut, pengembangan energi baru dan terbarukan, sebagaimana juga telah menjadi salah satu prioritas dalam RKP Tahun 2013.

**Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Hadirin Peserta Sidang Yang Terhormat,**

Terkait dengan pokok-pokok pembahasan RAPBN 2013, DPD-RI telah memberikan sejumlah catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah di antaranya:

Pertama, dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial serta dalam memacu percepatan pembangunan daerah, penyusunan kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2013, harus memperhitungkan optimalisasi seluruh instrumen negara baik berupa belanja pusat dalam bentuk dana dekonsentrasi/tugas perbantuan, dana

transfer daerah, dana perbankan, dan investasi swasta, maupun sumber dana lainnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Kedua, penyusunan RAPBN 2013 harus memberikan pemihakan kepada daerah-daerah yang relatif tertinggal dan rentan terhadap gejolak perekonomian nasional dan global. Bahwa dampak yang dirasakan oleh setiap daerah akan berbeda sesuai dengan struktur ekonomi, daya tahan, dan kapasitas fiskal setiap daerah. DPD RI menegaskan bahwa pengajuan RAPBN Tahun 2013 juga perlu dilengkapi dengan skenario dampak perubahan perekonomian makro terhadap perekonomian daerah. Lebih jauh, DPD-RI mendorong Pemerintah untuk menyampaikan perincian perkiraan dampak pelambatan ekonomi nasional terhadap perekonomian daerah, terutama dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan di setiap provinsi.

Ketiga, sejalan dengan penurunan asumsi pertumbuhan ekonomi, Pemerintah juga perlu mengimbangnya dengan upaya penajaman kebijakan dan program pembangunan untuk menjaga momentum percepatan *pertumbuhan* ekonomi nasional dan menjamin percepatan pembangunan bagi daerah-daerah yang relatif tertinggal.

Keempat, terkait dengan alokasi belanja, Pemerintah seharusnya menggunakan pendekatan keseimbangan antar-daerah, keadilan, dan pemihakan kepada daerah-daerah yang relatif tertinggal. Dana transfer ke daerah merupakan salah satu instrumen fiskal yang sangat penting untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah harus cepat menanggulangi berbagai hambatan dalam pengelolaan dana transfer daerah yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan dan kurang optimalnya penyerapan belanja daerah dengan langkah dan kebijakan yang tepat dan terukur.

**Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Hadirin Peserta Sidang Yang Terhormat,**

Dalam Masa Persidangan I, selain fokus untuk melakukan penyelesaian pembahasan RUU APBN 2013, DPR akan mengoptimalkan fungsi legislasi. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi utama DPR, capaiannya tidak terlepas dari hasil yang telah diperoleh dari tahun sidang sebelumnya. Dapat diungkapkan bahwa selama Tahun Sidang 2011—2012 yang ditutup akhir Juli lalu, capaian produk legislasi yang dihasilkan memang masih jauh dari harapan, karena capaian ini tidak berbanding lurus dengan

perencanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang telah ditetapkan.

Minimnya capaian produk legislasi pada Tahun Sidang 2011—2012, hendaknya menjadi perhatian bersama, baik DPR maupun Pemerintah. Beberapa kendala yang ditemui dan menjadi hambatan dalam proses penyelesaian RUU antara lain berkaitan dengan adanya perbedaan pandangan yang cukup tajam terhadap suatu substansi, baik antara DPR dengan Pemerintah maupun di antara fraksi-fraksi DPR.

Perbedaan pandangan adalah wajar di dalam proses berdemokrasi. Penyelesaian dalam menyikapi perbedaan pendapat, diupayakan melalui musyawarah mufakat. Upaya ini dilakukan untuk memperoleh hasil optimal guna mencapai kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan negara dan masyarakat.

Pada Masa Persidangan I, II, III dan IV Tahun Sidang 2011—2012, atas dasar penetapan Prolegnas 2011, DPR dan Pemerintah dapat menyelesaikan 26 (dua puluh enam) RUU, baik RUU Prioritas yang datang dari DPR dan Pemerintah, maupun RUU Kumulatif Terbuka, yaitu RUU yang berkaitan dengan APBN dan Pengesahan Konvensi.

Beberapa RUU yang mengalami perpanjangan beberapa kali dan belum juga tuntas, di antaranya RUU tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Keistimewaan Provinsi DIY, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar, RUU tentang Pangan, RUU tentang Koperasi, RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro, RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, RUU tentang Pendidikan Kedokteran, dan RUU tentang Organisasi Masyarakat.

Dalam kaitan inilah Pimpinan DPR meminta Presiden untuk membantu meminimalisir berbagai hambatan, sehingga efektifitas penyelesaian RUU dapat dioptimalkan. DPR berpandangan bahwa Prolegnas adalah tanggung jawab bersama, mengingat Prolegnas disusun sebagai instrumen pembangunan hukum, sekaligus sebagai bagian dari pembangunan nasional yang pada hakekatnya menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan nasional. Prolegnas disusun berdasarkan pada kebutuhan hukum yang nyata dan terukur. Juga kepada fraksi-fraksi dan para anggota DPR, kami mohon perhatian perlunya optimalisasi fungsi legislasi dengan pembahasan yang lebih intensif dan efektif.

Alhamdulillah, di antara RUU yang sudah disetujui, RUU tentang Pendidikan Tinggi yang pembahasannya mengalami

beberapa kali perpanjangan, telah diselesaikan. Pembahasan telah dilakukan secara ketat dan komprehensif dengan menerima banyak masukan dari kelompok-kelompok masyarakat, pemangku kepentingan dan para pemerhati dunia pendidikan tinggi.

RUU Pendidikan Tinggi yang sudah disahkan, merupakan bentuk tanggung jawab atas pengaturan pengelolaan perguruan tinggi yang harus berpihak kepada masyarakat serta harus mampu menjawab semua permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan tinggi selama ini.

RUU Pendidikan Tinggi telah memastikan tidak terjadi komersialisasi dan liberalisasi, dengan mengharuskan penyelenggaraan pendidikan tinggi berprinsip nirlaba, memastikan adanya tanggung jawab pendanaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, mendorong dunia usaha, dunia industri dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendanai pendidikan tinggi.

Semua pihak menyadari bahwa pendidikan tinggi merupakan tulang punggung bagi terciptanya masyarakat berbasis ilmu pengetahuan agar mampu memenangi persaingan dalam perekonomian dunia yang makin bergeser pada basis ilmu pengetahuan. Untuk mempercepat dan mendorong

permbangunan bangsa, diperlukan anak bangsa yang cerdas komprehensif. RUU ini juga meletakkan harapan pada Perguruan Tinggi untuk menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa, membudayakan dan memberdayakan bangsa dari Sabang sampai Merauke berdasar Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.

**Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Hadirin Peserta Sidang Yang Terhormat,**

Dalam kaitan dengan fungsi pengawasan, berbagai permasalahan telah mendapat perhatian dan porsi pembahasan oleh Komisi-Komisi DPR-RI, maupun oleh Komite DPD-RI.

Berkenaan dengan penegakan hukum, perhatian kita tertuju pada Aparat Penegak Hukum yang sedang menangani kasus-kasus korupsi, yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketiga aparat penegak hukum ini diminta untuk bekerja secara profesional, melakukan koordinasi yang sinergis dalam menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dengan lebih tepat, cepat dan tidak berlarut-larut, yang dilandasi kesadaran bahwa kita sedang mengemban tugas untuk mewujudkan cita-cita nasional dan untuk mencapai tujuan nasional. Dalam

melaksanakan tugas, semua aparat penegak hukum diminta untuk patuh kepada peraturan perundang-undangan.

Masalah lain yang menjadi perhatian DPR-RI dan DPD-RI adalah masalah pertanahan, terutama berkaitan dengan sistem kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan atas tanah. Konflik agraria dengan berbagai pemicu atau faktor penyebab, harus menjadi perhatian serius dalam kaitan dengan upaya menemukan solusi jangka panjang tentang masalah agraria. Persoalan agraria yang muncul akhir-akhir ini merupakan kebijakan dalam rangkaian antar-rezim pemerintahan, akan tetapi pengelolaannya saat ini dan antisipasi atas berbagai masalah potensial berikutnya, harus tetap menjadi prioritas untuk ditangani.

Di sisi lain, kiranya reforma agraria yang sudah direncanakan 10 (sepuluh) tahun yang lalu sudah dapat segera dituntaskan.

Hadirin Peserta Sidang Yang Terhormat,

Permasalahan lain yang menjadi perhatian kita adalah masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Permasalahan TKI sebenarnya sudah diatur dalam UU No. 39 Tahun 2004. Namun kenyataannya, UU tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang menyeluruh. Oleh

karena itu, DPR menganggap perlu melakukan revisi terhadap UU tersebut. Revisi ini telah disiapkan oleh Komisi IX, dan telah disetujui menjadi RUU DPR dan siap dibahas pada Masa Sidang yang akan datang dengan judul **RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri**.

Beberapa pertimbangan dilakukannya revisi terhadap UU tersebut antara lain, bahwa UUD NRI tahun 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Upaya perlindungan kepada pekerja Indonesia di luar negeri merupakan bentuk dari perwujudan hak dan kesempatan yang sama bagi TKI untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak sesuai dengan keterampilan, kemampuan, dan bakat yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat dan hak asasi manusia.

Selain TKI, persoalan lain yang tak kalah penting dan mendapat perhatian adalah persoalan kesejahteraan buruh. Dalam beberapa bulan terakhir, DPR mencatat setidaknya 3 (tiga) kali demo besar-besaran buruh. Kita bersyukur, bahwa aksi demo tersebut tidak berlanjut menjadi anarkis. Namun, hal ini setidaknya merupakan sinyal bagi DPR dan juga Pemerintah

untuk memperhatikan tuntutan mereka tentang kerja yang layak, upah yang adil dan peningkatan kesejahteraan dari waktu ke waktu.

Hadirin Peserta Sidang Yang Terhormat,

Sehubungan dengan datangnya Hari Raya Idul Fitri 1433 H, DPR meminta kepada Pemerintah untuk fokus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan penyediaan atau perbaikan infrastruktur transportasi. Akhir-akhir ini harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan pada hampir seluruh wilayah. Hal ini menuntut Pemerintah untuk menjaga stok pangan yang cukup dan mengendalikan harga agar tetap terjangkau.

Terkait dengan persiapan transportasi menjelang dan pasca lebaran, DPR meminta kepada Pemerintah agar hal ini ditangani dengan sebaik-baiknya. Harus kita akui bahwa masyarakat kita masih mengagungkan nilai-nilai tradisi silaturahmi kepada orang tua, saudara dan kerabat, yang kesemuanya diwujudkan dalam budaya mudik. Untuk itu, DPR meminta kepada aparat keamanan dan Kementerian Perhubungan untuk mempersiapkan sarana dan prasarana transportasi, sehingga perjalanan mudik dapat dilakukan dengan aman, nyaman sampai ke tempat tujuan dan

meminimalisir jumlah kecelakaan sebagai akibat dari tingginya arus mudik dan arus balik.

Hal lain yang menjadi perhatian DPR adalah program ketahanan pangan. Dalam pembahasan RAPBN Tahun 2013, DPR akan mendukung kebijakan fiskal untuk membangun ketahanan pangan nasional. Dalam jangka panjang masalah pangan seharusnya menjadi prioritas guna mengantisipasi timbulnya krisis pangan, termasuk permasalahan lahan dan infrastruktur irigasi, serta pengembangan varietas unggul, merevitalisasi sektor pertanian, terkait dengan kebutuhan pokok pangan dan bahan bakunya.

**Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Hadirin Peserta Sidang Yang Terhormat,**

Kiprah DPR-RI di berbagai forum antar-parlemen, baik regional maupun internasional, telah memberikan warna tersendiri. Kegiatan yang dilakukan melalui aktifitas diplomasi parlemen, semakin memiliki makna, tidak saja bagi kepentingan nasional tetapi juga bagi kepentingan regional dan global. Kami berpandangan bahwa aktifitas diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR, telah turut memperkuat politik luar negeri Indonesia, dan memberi kontribusi bagi pencarian solusi atas berbagai

permasalahan yang dihadapi dunia. Berbagai permasalahan internasional sesungguhnya juga menjadi *concern* forum antar-parlemen, dan DPR-RI sebagai bagian dari masyarakat internasional sudah tentu juga merasa terpanggil untuk berperan melalui forum-forum *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*, *Asian Parliamentary Assembly (APA)*, *Parliamentary Union of OIC Member Countries (PUIC)*, dan *Inter-Parliamentary Union (IPU)*.

Dalam menyikapi isu Palestina, yang juga sering diagendakan dalam sidang-sidang antarparlemen internasional seperti di forum IPU misalnya, sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia, DPR selalu menyuarakan dukungan penuh bagi terbebasnya Palestina dari penjajahan Israel dan tercapainya solusi damai atas wilayah tersebut.

Salah satu permasalahan serius di kawasan Asia Tenggara yang perlu kita respons saat ini adalah menyangkut nasib warga Rohingya di Myanmar, yang menjadi korban kekerasan komunal, menimbulkan korban jiwa dan banyak di antaranya menjadi pengungsi. DPR berpendapat, nasib warga Rohingya, harus direspons serius oleh badan-badan internasional. ASEAN sebagai organisasi regional yang menjunjung tinggi HAM harus menyikapi persoalan ini dengan sungguh-sungguh dan menentukan

langkah, karena masalah Rohingya adalah isu kemanusiaan. DPR mempercayakan kepada Pemerintah untuk bertindak pro-aktif menangani masalah ini, baik melalui jalur diplomasi maupun melalui langkah lainnya. Indonesia tidak boleh tinggal diam, karena upaya menciptakan perdamaian dunia, merupakan salah satu amanat konstitusi negara.

Hadirin Peserta Sidang Yang Terhormat,

Masih dalam kaitan dengan diplomasi parlemen, perlu kami sampaikan bahwa DPR-RI akan menjadi tuan rumah Sidang Umum AIPA ke-33, yang dilaksanakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 16 - 20 September 2012. Sidang Umum AIPA ke-33 tersebut mengambil tema "*Strengthening the Parliamentary Roles towards ASEAN Community 2015*", akan membahas sejumlah isu penting di bidang politik, ekonomi, sosial, dan organisasi, dan juga mengagendakan dialog dengan parlemen dari beberapa negara *observer*.

Sebagaimana yang telah disepakati melalui sidang *Executive Committee Meeting AIPA* bulan Juli yang lalu di Jogjakarta, persoalan-persoalan penting yang sedang dihadapi kawasan akan dibahas pada Sidang Umum tersebut, diantaranya pengembangan usaha kecil dan menengah di wilayah regional

ASEAN, peningkatan upaya memerangi pencucian uang, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, pencapaian MDG's, serta isu energi dan lingkungan hidup, dan dorongan bagi terwujudnya *ASEAN Community 2015*.

Selaku tuan rumah, DPR-RI mengharapkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk hadir dan menyampaikan *opening speech* pada upacara pembukaan Sidang Umum AIPA ke-33.

**Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Hadirin Peserta Sidang Yang Terhormat,**

Demikianlah Pidato Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan Pidato Presiden RI dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2013 dan Nota Keuangan beserta Dokumen Pendukung.

Kepada Saudara Presiden kami persilahkan.

**PIDATO PRESIDEN RI DALAM RANGKA
PENGANTAR/KETERANGAN PEMERINTAH ATAS
RUU TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2013**

PEMBAWA ACARA:

Penyerahan RUU APBN 2013 dan Nota Keuangan Beserta Dokumen Pendukung dari Presiden RI kepada Ketua DPR-RI, dan dilanjutkan penyerahan dari Ketua DPR-RI kepada Ketua DPD-RI.

Demikianlah telah kita ikuti bersama Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2013 beserta Nota Keuangannya. Atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya kami mempersilahkan Saudara Ahmad Rubaie anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional untuk membacakan doa.

<p style="text-align: center;">DOA OLEH ANGGOTA DEWAN</p>
--

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Ahmad Rubaie dari Fraksi Partai Amanat Nasional yang telah membacakan doa, kiranya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, mengabulkan doa kita bersama. Aamiin.

Dengan telah selesainya Pidato Presiden Republik Indonesia dan pembacaan doa, maka selesailah seluruh acara Rapat Paripurna DPR malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, anggota DPR RI dan Anggota DPD-RI, dan semua hadirin yang telah memberikan perhatian dan dukungan, sehingga memungkinkan acara ini berjalan dengan tertib dan lancar.

Dengan mengucap ***alhamdulillahirobil'alamin***, kami menutup Rapat Paripurna malam hari ini. ***Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.***

Ketok 3 kali

PEMBAWA ACARA:

Hadirin dimohon berdiri, menyanyikan bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

PEMBAWA ACARA:

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, didampingi Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD, meninggalkan ruang Paripurna DPR RI.

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

Dr. H. MARZUKI ALIE